



**PENGARUH PROFESIONALISME, PENGETAHUAN TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN INTENSITAS  
PEMBINAAN APARAT INSPEKTORAT TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan  
Gerbangkertasusila)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rizky Alivino Subagjo  
NIM 090810301034**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2013**



**PENGARUH PROFESIONALISME, PENGETAHUAN TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN INTENSITAS  
PEMBINAAN APARAT INSPEKTORAT TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan  
Gerbangkertasusila)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh:**

**Rizky Alivino Subagjo  
NIM 090810301034**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2013**



**PENGARUH PROFESIONALISME, PENGETAHUAN TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN INTENSITAS  
PEMBINAAN APARAT INSPEKTORAT TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan  
Gerbangkertasusila)**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh:  
Rizky Alivino Subagjo  
NIM 090810301034**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2013**

**SKRIPSI**

**PENGARUH PROFESIONALISME, PENGETAHUAN TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN INTENSITAS  
PEMBINAAN APARAT INSPEKTORAT TERHADAP KUALITAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Gerbangkertasusila)**

Oleh

**RIZKY ALIVINO SUBAGJO  
090810301034**

**Pembimbing:**

**Dosen Pembimbing I : Taufik Kurrohman, SE., M.SA., Ak.**

**Dosen Pembimbing II : Hendrawan Santoso Putra, SE., M.Si., Ak.**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER-FAKULTAS EKONOMI**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Alivino Subagjo

NIM : 090810301034

Jurusan : Akuntansi Reguler-Pagi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Gerbangkertasusila )” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 September 2013

Yang menyatakan,

Rizky Alivino Subagjo.  
NIM 090810301034

## **LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : “Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Gerbangkertasusila)”

Nama Mahasiswa : Rizky Alivino Subagjo

NIM : 090810301034

Jurusan : Akuntansi / S-1

Tanggal Persetujuan : 9 September 2013

**Dosen Pembimbing I,**

**Dosen Pembimbing II,**

**Taufik Kurrohman, SE., M.SA., Ak.**

**Hendrawan Santoso P., SE., M.Si., Ak.**

**NIP. 19820723 200501 1 002**

**NIP. 19740506 200212 1 006**

**Ketua Jurusan Akuntansi**

**Dr. Alwan S. Kustono, SE., M.Si., Ak.**

**NIP. 19720416 200112 1 001**

## JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH PROFESIONALISME DAN PENGETAHUAN  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DAN  
INTENSITAS PEMBINAAN APARAT INSPEKTORAT TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Gerbangkertasusila)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rizky Alivino Subagjo  
NIM : 090810301034  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

9 September 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

Ketua : **Andriana, SE., M.Sc., Ak.** (.....)  
NIP. 19820929 201012 2 002

Sekretaris : **Kartika, SE., M.Si., Ak.** (.....)  
NIP. 19820207 200812 2 002

Anggota : **Novi Wulandari, SE., M.Acc.Fin., Ak.** (.....)  
NIP. 19801127 200501 2 003

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,

**Dr. M. Fathorrozi., SE., M.Si.**  
NIP. 19630614 199002 1 001

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan segala rasa syukur, skripsi ini saya dedikasikan sebagai bentuk tanggung jawab dan baktiku kepada:

1. Mama Meliwati Nusi dan Papa Teguh Iman Subagjo, SE., M.Si. yang terkasih, terima kasih atas kasih sayang, doa, nasihat, dukungan materi dan moral yang tiada henti diberikan pada setiap perjalananku menuju kesuksesanku;
2. Kedua adikku Muhammad Ramadan Subagjo dan Raihan Fauzan Subagjo yang memberikan dukungan dan semangat;
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa, motivasi dan nasihat untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
4. Guru-guruku dari TK hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh rasa sabar;
5. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.



## **MOTTO**

“Keberanian, ketegasan, dan jiwa pantang menyerah harus selalu mengiringi langkah kita untuk terus maju.”

( **Joko Widodo** )

“Kepuasan itu terletak pada usaha, bukan pada pencapaian hasil. Berusaha keras adalah kemenangan besar.”

(**Mahatma Gandhi**)

“Kualitas bukanlah suatu kebetulan; kualitas selalu berasal dari usaha yang cerdas.”

(**John Ruskin**)

**Rizky Alivino Subagjo**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

### **ABSTRAK**

Pada saat ini aparat Inspektorat memiliki peran penting dalam menjalankan pengawasan pemerintah. Tugasnya adalah untuk memastikan bahwa pengawasan sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan para aparat Inspektorat juga berfungsi sebagai konsultan yang memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar tujuan di masa depan dapat tercapai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menguji pengaruh profesionalisme, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan intensitas pembinaan aparat Inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang dikumpulkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang dibagikan kepada aparat Inspektorat pemerintah daerah di wilayah eks-Gerbangkertasusila yang melakukan tugas pengawasan lebih dari setahun. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, profesionalisme, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan intensitas pembinaan aparat Inspektorat berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah eks-Gerbangkertasusila.

**Kata kunci:** Profesionalisme, Pengetahuan Manajemen Keuangan, Intensitas Pembinaan, pejabat Inspektorat, Review, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

## **Rizky Alivino Subagjo**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

### **ABSTRACT**

*At the present time Inspectorate officials have an important role in the running of the government oversight. His job is to ensure that the review of the financial accounting system area has been going well and the Inspectorate officials also serves as a consultant providing advice to future government objectives can be achieved. This study was conducted to determine and examine the effect of professionalism, knowledge of financial management and intensity of development inspectorate officials on the quality of local government financial reports. Data collected by giving the questions in the form of a questionnaire distributed to local government inspectorate officials in the ex-Gerbangkertasusila region who perform supervisory duties over a year. The data obtained were then processed by multiple regression. . Results showed that the three independent variables, professionalism, knowledge of financial management and intensity of development inspectorate officials as a significant positive influence factor of the quality of local government financial statements within the ex-Gerbangkertasusila region.*

**Keywords:** *Professionalism, Knowledge in Financial Management, Intensity of Development, Inspectorate officials, Review, Quality of Local Government Financial Statement.*

## RINGKASAN

**Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Gerbangkertasusila); Rizky Alivino Subagjo, 090810301034; 2013: 69 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.**

Pada masa sekarang ini peran aparat Inspektorat penting dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Tugasnya adalah reviu dalam memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan menilai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan dengan wajar, di luar dari tugas tersebut Aparat Inspektorat juga berperan sebagai konsultan yang memberikan masukan agar kedepan tujuan pemerintah dapat tercapai. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat.

Berdasarkan tugas pokok Aparat Inspektorat tersebut maka tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Sektor Publik, yang mana berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan good governance didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif,

menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh profesionalisme (X1), pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah (X2) dan Intensitas Pembinaan (X3) aparat Inspektorat terhadap kualitas LKPD. Populasi dari penelitian ini adalah aparat Inspektorat yang melakukan tugas pengawasan. Sedangkan sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan mendasarkan pada kriteria yaitu yang bekerja dalam tugas pengawasan lebih dari 1 tahun kerja. Diperoleh jumlah responden dari ketujuh Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya dan Kota Mojokerto yaitu sejumlah 124 Responden, dimana sebelumnya dilakukan uji pratest (uji pendahuluan) pada 25 orang responden pada Inspektorat Kabupaten Jember.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu profesionalisme, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan Intensitas Pembinaan aparat Inspektorat berpengaruh positif signifikan pada variabel dependen yaitu kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Gerbangkertasusila)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Taufik Kurrohman, SE, M.SA, Ak., selaku Dosen Pembimbing Utama, Hendrawan Santosa Putra, SE, M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Kartika, SE, M.Sc, Ak., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Andriana SE, M.Sc, Ak. , Kartika, SE, M.Sc, Ak., dan Novi Wulandari, SE, M.Acc.Fin., Ak. Selaku dosen penguji pada sidang Skripsi dan pendadaran;
4. Para dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang akan sangat bermanfaat bagi saya untuk saat ini dan di kemudian hari;
5. Orang tua Teguh Iman Subagjo, SE, M.Si., dan Meliwati Nusi, yang telah memberikan doa, dukungan moral, motivasi dan finansial dari awal pendidikan hingga akhir pendidikan sarjana ini;
6. Keluarga besar yang telah memberikan dorongan, semangat dan doanya demi terselesainya skripsi ini;

7. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melakukan penelitian di daerahnya masing-masing;
8. Para responden yang bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga guna keberhasilan penelitian ini;
9. Teman-teman kampusku Akuntansi angkatan 2009 khususnya kelas A: Zaky, Ajay, Amirul, Andi, Agus, Derro, Martian, Ropek, Firman, Nanto, Fajar, Renaldi, Aan, Savitri, Dwi, Vonny, Riris, Ayu, Onik dan teman-teman kampus yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang selama empat tahun terakhir ini berjuang bersama untuk mendapatkan gelar sarjana;
10. Keluarga besar kost Ijoe (Ucil, Abah, Beye, Rizko, Emon, Ismu, Indro, Ryan, mas Soffi, mas Aan, Andre) yang selama empat tahun terakhir ini selalu bersama sebagai satu keluarga, kalian adalah keluarga keduaku di jember;
11. Penyemangatku Ira Mustika Wiranti yang selalu memberiku dukungan doa, semangat, dan motivasi. Semoga cepat bisa menyusulku mendapatkan gelar SE;
12. Bapak dan Ibu Soewito yang telah berbaik hati memberikan saya sebuah kamar yang nyaman untuk saya tempati selama 4 tahun terakhir ini;
13. Warung kopi om Zen (BMW) dan teman-teman BMW holic: Ucil, Beye, Abah, Inod, Umo, Rizko, om Leo, Apong, Kucing, Borok.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 9 September 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Aparat Inspektorat.....	10
2.2 Profesionalisme .....	13
2.3 Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah .....	15



2.4 Pembinaan atas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).....	17
2.5 Review atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).....	20
2.6 Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).....	21
2.7 Penelitian Terdahulu .....	24
2.8 Kerangka Konseptual.....	25
2.8.1 Pengaruh Profesionalisme Aparat Inspektorat terhadap Kualitas LKPD .....	26
2.8.2 Pengaruh Pengetahuan Aparat Inspektorat tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas LKPD.....	27
2.8.3 Pengaruh intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat terhadap kualitas LKPD	28
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.3 Populasi dan Sampel .....	31
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya .....	31
3.5 Uji Kualitas Data.....	33
3.5.1 Uji Validitas .....	33
3.5.2 Uji Reliabilitas .....	34
3.6 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.6.1 Uji Normalitas.....	34
3.6.2 Uji Multikolinearitas .....	35
3.6.3 Uji Heterokedstisitas .....	35
3.7 Uji Hipotesis .....	35
3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	35
3.7.2 Uji F .....	36
3.7.3 Uji t .....	36

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian.....	38
4.2 Analisis Deskriptif .....	44
4.2.1 Deskriptif Responden.....	44
4.2.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	47
4.3 Pengujian Data .....	49
4.3.1 Uji Validitas .....	50
4.3.2 Uji Reliabilitas .....	52
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	52
4.4.1 Uji Normalitas .....	52
4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	53
4.4.3 Uji Heterokedastisitas .....	54
4.5 Uji Hipotesis .....	56
4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	56
4.5.2 Uji F .....	57
4.5.3 Uji t .....	58
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian .....	59
4.6.1 Pengaruh Profesionalisme Aparat Inspektorat terhadap Kualitas LKPD .....	59
4.6.2 Pengaruh Pengetahuan Aparat Inspektorat tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas LKPD .....	61
4.5.3 Pengaruh Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah .....	62

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan .....	64
5.2 Keterbatasan.....	65
5.3 Saran.....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.....	6
4.1 Data Penyebaran dan Pengembalian Kuisisioner .....	44
4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
4.3 Demografi Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	45
4.4 Demografi Responden Berdasarkan Umur .....	46
4.5 Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	47
4.6 Rekapitulasi Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	48
4.7 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas.....	51
4.8 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas .....	52
4.9 Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinieritas .....	54
4.10 Rekapitulasi Hasil Regresi Linier Berganda .....	56
4.11 Rekapitulasi Hasil Uji F.....	58
4.12 Rekapitulasi Hasil Uji t.....	58

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual .....	25
4.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat .....	40
4.2 Uji Normalitas <i>normal probability plot</i> .....	53
4.3 Uji Heterokedastisitas <i>Scatterplot</i> .....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

Lampiran 2. Statistik Deskriptif Variabel, Tabulasi Deskriptif Responden & Statistik  
Variabel

Lampiran 3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik

Lampiran 5. Uji Hipotesis

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang Masalah**

Pada masa sekarang ini arah internal auditor bukan lagi sebagai *watchdog* yang hanya bertugas mengawasi berjalannya sistem dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di setiap instansi suatu daerah, tetapi juga sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian peranan internal auditor sangat diperlukan guna mencapai tujuan organisasi. Dengan melakukan peranannya dalam mendorong pelaksanaan manajemen resiko, pengawasan, dan proses tata kelola. Lebih lanjut peranan audit internal juga dapat dilihat dari fungsi *insight*, *oversight* dan *forsight*. Fungsi *insight* adalah pelaksanaan pengawasan operasional ke dalam organisasi, yaitu auditor internal mengawasi pelaksanaan efisiensi, efektivitas dan ekonomis organisasi. Fungsi *oversight* adalah fungsi pengawasan atas keseluruhan proses kegiatan organisasi, termasuk kekuatan dan kekurangan. Sedangkan *forsight* diartikan auditor internal harus mempunyai pandangan ke depan, memberikan prediksi sekaligus langkah antisipasi bagi kemajuan organisasi.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. (Falah, dalam Efendy, 2010), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah maupun tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal pada umumnya. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2002).

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi,

keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kabupaten; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten dan kota terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah (Urban), dan kelompok jabatan fungsional; kelima, penyelenggaraan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, *supervise* (mengawasi) dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Aparat Inspektorat adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fahrezi, 2011).

Berdasarkan tugas pokok Aparat Inspektorat tersebut maka tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Sektor Publik, yang mana berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002).



Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good governance di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad governance) kemudian disebabkan juga oleh buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001).

Menurut Mardiasmo (2002), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya suatu pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah berbentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kini diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan

pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

*Governmental Accounting Standard Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No.1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai Laporan Keuangan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni Relevan dan Andal.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Kemudian terkait dengan LKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui secara independen bagaimana kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah maka dilakukan audit oleh pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang pada akhirnya akan memberikan suatu opini atas LKPD berdasarkan bukti-bukti, Laporan Keuangan, dan temuan-temuan yang ada. Opini yang diberikan oleh BPK memiliki berbagai tingkatan, mulai dari yang paling baik sampai dengan yang tidak mendapatkan opini. Laporan keuangan yang baik atau wajar dan tidak memiliki penyimpangan sama sekali diberi opini "Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)" atau WTP. Opini selanjutnya adalah WTP DPP "Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas" yang mana opini tersebut wajar dan tidak memiliki penyimpangan sama sekali tetapi diimbui dengan paragraf penjelas sebagai dasar dan jastifikasi penetapan opini. Opini "Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)" atau WDP diberikan kepada laporan keuangan yang baik dan wajar, sesuai dengan ketentuan-ketentuan namun tidak untuk beberapa hal yang dikecualikan. Opini "Tidak Wajar" atau "*Adversed opinion*" diberikan kepada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sedangkan opini "Tidak Memberikan Pendapat" atau "*Disclaimer of Opinion*" diberikan jika tim pemeriksa tidak dapat menyatakan pendapat atas laporan keuangan karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan (Poernomo, 2011).

Realita yg terjadi saat ini bahwa, struktur kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya terisi karena masih minimnya jumlah pegawai ahli yang memang berlatar belakang disiplin ilmu Akuntansi dan memiliki pengalaman mengaudit pada Inspektorat kabupaten dan kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila dengan

demikian, pelaksanaan tugas dan wewenang pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat kabupaten dan kota belum maksimal dan secara otomatis akan berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang kurang memenuhi kewajaran atas pelaporan keuangan yang mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Berdasarkan data opini BPK maupun fenomena yang terjadi pada Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila yang dapat dikatakan fluktuatif pada beberapa kabupaten dan kota maka peneliti menetapkan objek penelitiannya pada Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila. Berikut LHP LKPD Semester I TA 2012 oleh BPK di Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila:

No.	Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2006	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011
1.	Kab. Bangkalan	WDP	TW	WDP	WDP	WTP	WTP
2.	Kab. Gresik	WDP	TW	WDP	WDP	WDP	WDP
3.	Kab. Lamongan	WDP	TW	WDP	WDP	WDP	WDP
4.	Kab. Mojokerto	WDP	TW	WDP	WDP	WDP	TMP
5.	Kab. Sidoarjo	WDP	TW	WDP	TMP	WDP	WDP
6.	Kota Mojokerto	WDP	TW	WDP	WDP	WTP	WTP DPP
7.	Kota Surabaya	WTP	TW	TMP	TW	WDP	WDP

**Tabel 1.1**

**Laporan Hasil Pemeriksaan BPK**

Peneliti disini mencoba menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2012) yaitu, Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan aparat Inspektorat tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus pada pemerintah daerah se eks Karesidenan Besuki) yang mana dalam penelitian tersebut disebutkan dalam saran agar memperbanyak cakupan wilayah penelitian dan disarankan untuk menambah

variabel yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang kemudian dapat melihat pengaruh lain selain profesionalisme dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pada penelitian ini, peneliti menambahkan variabel Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat terhadap SKPD yang mana dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah jika dilaksanakan secara intens, baik, dan benar. Menurut Musanef dalam Alexa (2010) bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian terhadap segala sesuatu dapat berjalan secara berdaya dan berhasil. Dengan kata lain semakin intens Aparat Inspektorat memberikan pembinaan terhadap SKPD akan semakin baik pula pemahaman SKPD terhadap pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun daerah dan SAP yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang, penelitian yang dilakukan sebelumnya, dan dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini dalam lingkup kerja Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam beberapa pernyataan berikut :

1. Apakah profesionalisme aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila.
2. Apakah pengetahuan aparat Inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila.

3. Apakah Intensitas pembinaan aparat Inspektorat Pada SKPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah di uraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan aparat inspektorat tentang pengolahan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh intensitas pembinaan aparat inspektorat pada SKPD terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah yang terdapat dalam pemerintahan daerah sebagai wujud kepedulian akan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah terutama untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, literatur kepustakaan, informasi, dan pengetahuan bagi berbagai pihak dan dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Aparat Inspektorat

Sebagai masukan dalam mendukung peranan aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan pembinaan guna mewujudkan *good*

*governance*. Sehingga aparat Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.

#### 4. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai informasi serta masukan dalam mengevaluasi tugas aparat Inspektorat dalam melakukan reuiu Laporan Keuangan Pemerintah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Aparat Inspektorat**

Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman, tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah (Fabanyo, 2011) :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (dalam Fabanyo, 2011) yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid.
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu untuk dilaksanakan.
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada dalam organisasi.



7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagalnya operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus membuat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi.
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.
10. Diterima para anggota organisasi maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

Pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan daerah adalah sebuah penilaian secara sistematis dan obyektif yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / aparat Inspektorat terhadap operasi, pengelolaan resiko dan sistem pengendalian dalam instansi pemerintah (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menentukan, apakah :

1. Keuangan negara telah dikelola secara ekonomis dan efisien serta mendorong tercapainya tujuan negara secara efektif.
2. Seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai sistem, prosedur dan aturan hukum yang berlaku.
3. Pelaporan keuangan dan kinerja telah disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
4. Terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat, yang kesemuanya dilakukan untuk dikonsultasikan dengan pimpinan negara/ daerah dan para pejabat publik terkait agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif serta dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program.

Peran aparat Inspektorat menurut Bastian (dalam Rosnidah, 2010) adalah untuk memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan laporan keuangan daerah disajikan dengan wajar. Selain itu adalah untuk membantu kepala daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum. Aparat Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping itu aparat Inspektorat mempunyai fungsi yaitu (Fabanyo, 2011) :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional.
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Daerah lainnya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.
4. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak.
5. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah.
6. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi.
7. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
8. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan.
10. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati.

## 2.2 Profesionalisme

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan bahwa “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan”.

Menurut Arens (2010), profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang dan lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang- Undang dan peraturan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan profesionalisme, aparat Inspektorat secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama harus mempunyai (Kuntadi, 2011) :

1. Pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya yaitu pengetahuan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya,
2. Perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun, dan loyal,
3. Kemampuan mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi lanjutan yang berkesinambungan,
4. Kemampuan melaksanakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama,
5. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

Profesionalisme dapat dicerminkan ke dalam lima hal, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi (Rosnidah, 2010).

### 1. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi merupakan suatu sikap yang teguh untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan kecakapan yang dimiliki.

### 2. Pemenuhan kewajiban sosial

Pemenuhan kewajiban sosial merupakan suatu paradigma mengenai pentingnya peranan sebuah profesi dan manfaat yang didapat, baik oleh masyarakat maupun kalangan profesional lainnya karena adanya pekerjaan tersebut.

3. Sikap kemandirian

Sikap kemandirian adalah suatu sikap dari seseorang yang profesional yang dapat membuat sebuah keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap peraturan profesi merupakan suatu kepercayaan bahwa yang paling berhak menilai bahwa suatu pekerjaan dianggap profesional atau tidak adalah rekan seprofesi atau yang mempunyai kompetensi yang sama dalam bidang ilmu atau pekerjaan tersebut.

5. Kualitas hubungan dengan sesama profesi

Kualitas hubungan dengan sesama profesi dapat terbentuk baik melalui organisasi formal maupun dalam kelompok kolega sebagai ide utama dalam melaksanakan pekerjaan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalismenya, aparat Inspektorat harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi. Selain itu perlu memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik. Dalam mempertahankan profesionalismenya, aparat Inspektorat harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan, tidak berpihak, bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan serta bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesionalismenya dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya (Standar Pemeriksa Keuangan Negara, 2007).

### 2.3 Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengetahuan memegang peranan penting agar suatu organisasi dapat berjalan secara maksimal. Aparat Inspektorat seharusnya mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal.

Menurut Mardiasmo (dalam Nasrullah, 2011) perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumbuh pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi alokasi anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dan DPRD dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti: DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan pegawai negeri sipil daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini, rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, pelaporan anggaran, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengetahuan mengenai hal ini berguna untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan anggaran dan juga tidak menyimpang dari peraturan yang ada (Effendy, 2010).

Menurut Domai (dalam Rinaldi, 2011) tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah adalah :

1. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah.
2. Setiap anggaran daerah yang dibuat/ disusun diusahakan berdasar pada perbaikan-perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya.
3. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur serta memudahkan untuk melakukan pengawasan.
4. Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju Pemerintah Daerah.

5. Untuk menampung dan menganalisa serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi.

Reviu yang dilakukan aparat Inspektorat adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi aparat Inspektorat untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang kini diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah".

#### **2.4 Pembinaan atas SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)**

Manusia sebagai anggota merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi, karena maju mundurnya suatu organisasi sangat tergantung pada unsur manusia sebagai pelaksana dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu perlu adanya suatu pembinaan agar apa yang direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Sudjana (2004: 209) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pembinaan yaitu "Sebagai rangkaian upaya pengendalian secara professional terhadap semua unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna". Menurut Musanef dalam Alexa (2010) bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah "Segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna".

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas maka dapat diketahui bahwa pembinaan pegawai perlu dilakukan baik untuk pegawai yang sudah lama maupun pegawai yang baru bekerja, karena pembinaan tersebut merupakan tugas seorang pimpinan dalam usaha untuk menggerakkan para bawahan agar mereka dapat dan mau bekerja dengan baik.

Untuk menjaga agar tetap terdapat keseimbangan antara kemampuan kerja pegawai dalam kelangsungan hidup organisasi diperlukan adanya teknik-teknik pembinaan pegawai. Teknik-teknik pembinaan pegawai yang dikemukakan oleh Moenir dalam Alexa (2010) adalah :

1. Pengembangan pegawai, ialah suatu usaha yang ditujukan untuk memajukan pegawai baik dari segi karier maupun kemampuan.
2. Disiplin ialah usaha yang dilakukan untuk menciptakan keadaan di suatu lingkungan kerja yang tertib, berdaya guna dan berhasil guna melalui sistem pengaturan yang tepat.
3. Penghargaan ialah ucapan terima kasih seseorang yang telah berusaha bekerja semata-mata bukan untuk keperluan sendiri melainkan untuk keperluan orang lain.
4. Keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja.
5. Pemberian perangsang ialah benda atau hal lain yang immaterial yang menarik sehingga selalu menimbulkan kegairahan untuk mendapatkannya dan memilikinya.

Dalam penelitian ini yang memberikan pembinaan adalah Aparat Inspektorat terhadap SKPD pada setiap pemerintahan Daerah, yang mana pembinaan tersebut bertujuan agar seluruh aspek dalam pemerintahan daerah mengetahui dan paham akan prosedur dan perundang-undangan dalam proses pembentukan dan pelaporan keuangan daerah. Sehingga pada akhirnya SKPD terkait akan membentuk suatu laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan dengan baik dan benar dan sesuai dengan perundang-undangan dan SAP yang berlaku.



Untuk mengukur keberhasilan pembinaan, dapat dilihat dari kinerja pegawai. Pengertian kinerja menurut Iskandar (dalam Alexa, 2010) adalah : “Suatu kemampuan dan keahlian seseorang dalam memahami tugas dan fungsinya dalam bekerja”.

Sedangkan Mangkunegara (dalam Alexa, 2010) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kinerja (prestasi kerja) adalah : “Hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”.

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa untuk mengetahui optimal atau tidaknya suatu kinerja dapat dilihat dari indikator-indikator yang timbul dan yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dwiyanto (dalam Pasolong, 2008) mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Produktivitas, bahwa produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Dan pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.
2. Kualitas layanan, maksudnya bahwa kualitas dari pelayanan yang diberikan sangat penting untuk dipertahankan.
3. Responsivitas, maksudnya bahwa birokrasi harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Responsibilitas, maksudnya bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan birokrasi baik yang eksplisit maupun yang implisit.
5. Akuntabilitas, maksudnya bahwa seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat

politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh pendapat ahli di atas maka untuk mengukur kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan lima indikator antara lain produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

## **2.5 Review atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)**

Review adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi aparat Inspektorat untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sehingga sebenarnya review tidak memberikan dasar untuk menyatakan (opini) atas laporan keuangan, tetapi review atas LKPD dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas atas kualitas LKPD (Doni, 2011).

Aparat Inspektorat wajib melaksanakan reuiu atas LKPD sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 33 PP tersebut, dinyatakan bahwa review atas laporan keuangan oleh aparat Inspektorat adalah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut. Review dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi akan disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah.

Laporan hasil review disajikan dalam bentuk yang memuat “Pernyataan Telah Direview” dan ditandatangani oleh inspektur daerah dan disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab (PTJ) dan

selanjutnya siap untuk dilakukan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam rangka melaksanakan kegiatan review di lapangan dituntut beberapa persyaratan minimal sebagai berikut (Doni, 2011):

1. Adanya kelembagaan yang mendukung kegiatan review yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
2. Kapasitas pelaksanaan review di lapangan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
3. Adanya dukungan sistem dan teknologi informasi yang memadai.

Review bisa dilaksanakan secara paralel dengan LKPD. Reviu paralel dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat dilakukan segera. LKPD yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diajukan kepada kepala daerah dan sudah mengakomodasi hasil review Inspektorat.

Review atas LKPD inilah yang nantinya ditujukan untuk menginformasikan kepada kepala daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerahnya. Informasi tersebut selanjutnya digunakan kepada kepala daerah untuk memperbaiki ketepatan dan kesesuaian laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku serta meningkatkan kinerja masing-masing organisasi perangkat daerahnya (Doni, 2011).

## **2.6 Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)**

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Laporan Keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah dalam menunjukkan ketaatan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan; Neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; Laporan Arus Kas (LAK) yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kini diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (Doni, 2011).

Jika dalam penilaian kualitas LKPD, salah saji material dapat dideteksi dan dikoreksi atau diungkapkan oleh aparat Inspektorat maka kualitas LKPD dapat dimungkinkan untuk diperbaiki. Sebaliknya, kegagalan aparat Inspektorat dalam mendeteksi salah saji material atau kegagalan untuk mengoreksi sebelum penerbitan laporan audit dengan opini, tidak akan memperbaiki kualitas LKPD (Sumarwoto, 2007).

Kriteria kualitas laporan keuangan mengarah pada informasi yang dihasilkan akan memberikan kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa

kriteria kualitas informasi spesifik-keputusan, diantaranya adalah (Suwardjono : 164-177) :

1. Relevan; kemampuan informasi dalam membantu pemakai untuk mencapai tujuannya, untuk dipahami maknanya, dan tepat waktu dalam ketersediaannya untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan atau kebijakan.
2. Andal ; kemampuan informasi untuk memberi keyakinan dan keterujian bahwa informasi tersebut benar atau valid, termasuk ketepatan penyimbolan (kecocokan pengukur dan fenomena yang diukur).
3. Dapat dibandingkan ; kemampuan informasi untuk membantu para pemakai dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik.
4. Taat asas ; mengikuti standar atau metode yang sama dari periode ke periode berikutnya.
5. Netral ; ketidakberpihakan dan tidak bertindak sesuai keinginan pihak tertentu atau menguntungkan/merugikan pihak tertentu untuk menghindari akibat/konsekuensi.

Dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) pun disebutkan bahwa LKPD seharusnya dapat menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya, menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mempunyai peranan prediktif dan prospektif dalam memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan dan sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan. Selain itu dapat menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas, relevan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Maka jelas peranan aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol

kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel.

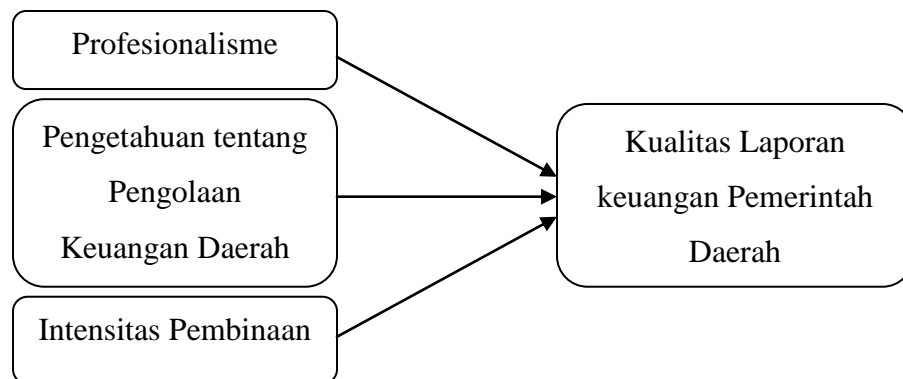
## 2.7 Penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Rosmawati (2011) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor dan peran auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota Bandung.
2. Penelitian Puspitasari (2012) dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Se Eks Karesidenan Besuki)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengetahuan aparat Inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah telah cukup baik dimiliki oleh aparat Inspektorat dalam pelaksanaan kerja reviuinya.
3. Penelitian Amrullah dalam Doni (2011) dengan judul “ Pengaruh *Personal Background*, Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Pelaksanaan Audit Intenal terhadap Peran Auditor Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Baik Secara Simultan Maupun Parsial”. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, *personal background*, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap peran auditor Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, dan secara parsial, *personal background* tidak berpengaruh terhadap peran auditor Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
4. Penelitian Fahrezi (2011) dengan Judul “Kendala-Kendala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Fungsional”. Hasil Penelitian ini menemukan fakta bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan

berkala dalam bentuk pengawasan dan pembinaan reguler. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan reguler tersebut inspektorat mendatangi SKPD (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) untuk diperiksa. Inspektorat kabupaten Pasaman Barat melakukan pengawasan berkala bervariasi ada yang 2 kali dalam satu tahun dan ada yang satu kali setahun. Sehingga ini menjadi sebuah kendala dalam pengawasan pemerintahan daerah. Penyebabnya adalah masih Kurangnya Sumber Daya manusia (SDM) Inspektorat sehingga sulit untuk melakukan pengawasan rutin. Pada akhirnya, kendala ini akan berdampak pada kualitas pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh inspektorat.

## 2.8 Kerangka konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 2.1

### Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, dapat diketahui bahwa variabel bebas dalam penelitian ini adalah profesionalisme, pengetahuan aparat Inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah dan Intensitas Pembinaan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

### **2.8.1 Pengaruh profesionalisme aparat Inspektorat terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Profesionalisme dapat terlihat dari suatu sikap yang teguh untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan kecakapan yang dimiliki, dalam pemenuhan kewajiban sosial mengenai seberapa pentingnya suatu peranan dan manfaat sebuah profesi, sikap dalam membuat suatu keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, yakin terhadap peraturan profesi yang di emban, dan menjalin hubungan baik dengan sesama profesi. Menurut Arens (2010), profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang dan lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang- Undang dan peraturan masyarakat.

Aparat Inspektorat merupakan suatu jabatan profesi dalam pemerintahan daerah yang perlu untuk memiliki sikap profesionalisme. Hal ini untuk memperlancar jalannya seluruh tugas, fungsi dan juga mempertegas peran aparat Inspektorat dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan dan meyakinkan bahwa setiap kegiatan pemerintah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semua pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya pemerintah tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Maka Aparat Inspektorat bertugas untuk memastikan bahwa LKPD bebas dari dugaan salah saji material yang nantinya akan diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Aparat Inspektorat harus memiliki sikap jujur, independen, dan selalu terbuka terhadap segala hasil yang ditemukan dan segera memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan guna peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dengan kata lain, kualitas audit inilah yang nantinya akan berdampak pada kualitas LKPD. Dalam penelitian Puspitasari (2012) profesionalisme aparat Inspektorat Kabupaten Se Eks Karesidenan Besuki berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Se Eks Karesidenan Besuki. Dalam penelitian Lubis (2009) , variabel kecakapan profesional merupakan variabel yang paling berpengaruh



secara dominan dalam kualitas hasil pemeriksaan pada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Karo demi terciptanya LKPD yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil penelitian tersebut maka dibuat hipotesis alternatif:

**H1: Profesionalisme aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

### **2.8.2 Pengaruh pengetahuan aparat Inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah harus dimiliki oleh setiap aparat Inspektorat. Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, pelaporan anggaran, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengetahuan mengenai semua hal tersebut berguna untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan anggaran dan juga tidak menyimpang dari peraturan yang ada (Efendy, 2010).

Pada setiap anggaran dari perencanaan hingga penatausahaan perlu dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan realisasi anggaran yang diberikan. Semua hal ini tentunya harus benar-benar dipahami oleh aparat Inspektorat sebagai bentuk pengawasan bahwa perencanaan serta penggunaan terkait keuangan tidak disalahgunakan dan telah dilaporkan dengan jujur, netral, dan relevan. Hasil penelitian Amrullah (2009) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap peran aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian Puspitasari (2012) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Se Eks

Karesidenan Besuki. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat diambil hipotesis alternatif :

**H2: Pengetahuan aparat Inspektorat mengenai pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

### **2.8.3 Pengaruh Intensitas Pembinaan aparat Inspektorat pada SKPD terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Manusia sebagai anggota merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah organisasi, karena baik atau buruknya suatu organisasi sangat tergantung pada unsur manusia sebagai pelaksana dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu perlu adanya suatu pembinaan agar apa yang direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

Sudjana (2004: 209) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pembinaan yaitu “Sebagai rangkaian upaya pengendalian secara professional terhadap semua unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna”. Kemudian menurut Musanef dalam Alexa (2010) bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah “Segala usaha maupun tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”. Dalam penelitian ini yang memberikan pembinaan adalah Aparat Inspektorat terhadap SKPD, yang mana pembinaan tersebut bertujuan agar seluruh aspek dalam pemerintahan daerah mengetahui dan paham terhadap prosedur dan perundang-undangan dalam proses pembentukan dan pelaporan keuangan daerah. Sehingga pada akhirnya SKPD terkait akan menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomi kemudian membentuk suatu laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan dengan baik, benar dan bermutu,

sesuai dengan perundang-undangan dan SAP yang berlaku. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka, dapat diambil hipotesis alternatif:

**H3: Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 `Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti, yaitu diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari Aparat Inspektorat Kabupaten dan kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila yang melakukan tugas pengawasan sebagai responden dalam penelitian ini. Sedang untuk data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro, 1999 ; 147). Data sekunder yang dimaksud yaitu seperti struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi aparat Inspektorat, dan perda yang berlaku pada setiap Inspektorat Pemerintah Aparat Inspektorat Kabupaten dan kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik kuisisioner. Kuisisioner adalah suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan (Indriantoro, 1999 :154). Karena kuisisioner diciptakan sendiri oleh peneliti, maka harus dilakukan uji pratest ( uji coba sebelum penelitian yang sebenarnya dilakukan). Kuisisioner dirancang sendiri dengan alasan bahwa dari peneliti terdahulu tidak menyajikan contoh kuisisioner yang terkait.

### 3.3 Populasi dan Sempel

Populasi adalah kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu ( Indriantoro, 2002 : 115). Populasi penelitian ini adalah seluruh aparat Inspektorat Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Gerbangkertasusila yang melakukan tugas pengawasan dari inspektur hingga inspektur pembantu wilayah dan jabatan fungsional auditor.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Sampel penelitian ini adalah aparat Inspektorat Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Gerbangkertasusila yang terlibat minimal satu tahun kerja dalam pelaksanaan tugas pengawasan dengan pertimbangan bahwa aparat Inspektorat yang terlibat minimal satu tahun kerja ini telah memiliki pemahaman yang cukup atas kondisi dan prosedur kerja pengawasan pemerintahan daerahnya.

### 3.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam pengolahan dan analisis data, digunakan beberapa variabel operasional. Definisi operasional yang berkaitan dengan proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Y) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kriteria kualitas LKPD dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dimana kriteria tersebut tersaji pada 9 pertanyaan sebagai indikator. Pengukuran variabelnya menggunakan skala lima angka (Skala Likert) yaitu metode yang mengukur sikap dan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu. Metode ini menggunakan angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS) dan angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju

(STS). Perinciannya adalah sebagai berikut : Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), angka 3 = Netral (N), angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

## 2. Variabel Independen

a. Profesionalisme (X1) yang dimaksudkan dalam penelitian ini tercermin dalam 5 dimensi keprilakuaan terkait pengabdian pada profesi, pemenuhan kewajiban sosial, sikap kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan kualitas hubungannya dengan sesama profesi yang terdapat dalam penelitian Ida Rosnidah dengan judul “ Analisis dampak Motivasi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah ( Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Cirebon)” serta makna profesionalisme menurut SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara). Variabel ini akan tersaji pada 9 pertanyaan kuisisioner sebagai indikator. Pengukuran variabelnya menggunakan skala lima angka (Skala Likert) yaitu metode yang mengukur sikap dan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu. Metode ini menggunakan angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS) dan angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut : Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), angka 3 = Netral (N), angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

b. Pengetahuan pengelolaan keuangan daerah (X2) yang dimaksudkan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Hal-hal yang menjadi instrumen kuisisioner meliputi pernyataan kesetujuan/tidak setuju atas pemahaman mengenai ruang lingkup keuangan daerah, struktur APBD, pemahaman pengelolaan terkait perencanaan anggaran sampai pertanggungjawaban anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah dimana kesemuanya itu tersaji dalam 7 pertanyaan kuisisioner sebagai indikator.

Pengukuran variabelnya menggunakan skala lima angka (Skala Likert) yaitu merupakan metode yang mengukur sikap dan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu. Metode ini menggunakan angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS) dan angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut : Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), angka 3 = Netral (N), angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

- c. Intensitas Pembinaan (X3) yang dimaksudkan dalam penelitian ini didasarkan pada Sudjana (2004: 209) yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pembinaan. Kemudian Teknik-teknik pembinaan pegawai yang dikemukakan oleh Moenir dalam Alexa (2010), yang selanjutnya yang dikemukakan oleh Dwiyanto (dalam Pasolong, 2008) mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja. Maka tersaji 9 pertanyaan sebagai indikator. Pengukuran variabelnya menggunakan skala lima angka (Skala Likert) yaitu merupakan metode yang mengukur sikap dan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu. Metode ini menggunakan angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS) dan angka 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS) Perinciannya adalah sebagai berikut : Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), angka 3 = Netral (N), angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

### **3.5 Uji Kualitas Data**

#### **3.5.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dan apakah kuisisioner tersebut benar-benar cocok untuk digunakan pada penelitian ini. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Instrumen dikatakan valid bila mempunyai nilai koefisien korelasi (rhitung)

> ( $r$  tabel), selain itu, validitas dapat dilihat dari nilai signifikansi, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka instrumen dapat dikatakan valid.

### 3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji realibilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Realibilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2011:47). Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai *cronbach alpha* untuk masing- masing variabel. Suatu alat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* > 0,6.

## 3.6 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. Dalam melakukan penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 alat uji, sebab data yang peneliti gunakan merupakan data primer dalam bentuk kuisisioner dan tidak berhubungan dengan model data yang memakai rentang waktu. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

### 3.6.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji ini dapat dilihat dengan menggunakan *normal probability plot*. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar di sekitar garis diagonal (Ghozali, 2011:160). Terpenuhinya syarat normalitas akan



menjamin dapat dipertanggungjawabkannya model analisis yang digunakan, sehingga kesimpulan yang diambil juga dapat dipertanggungjawabkan .

### **3.6.2 Uji Multikolinieritas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas multikolinieritas) (Ghozali, 2011:105). Mengukur multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* atau VIF (*variance inflation factor*) dari masing-masing variabel. Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Dapat dilihat juga dari korelasi pearson antar variabel independen, dimana dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilainya di bawah 0,8 (Wijayanto, 2008).

### **3.6.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui adanya heterokedastisitas dapat dilihat dari gambar Scatterplot, apabila ada pola-pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Regresi yang baik bebas dari heterokedastisitas (Ghozali 2011:139).

## **3.7 Uji Hipotesis**

### **3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, dimana analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengukur

pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali 2011:99). Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta

X1 : Profesionalisme

X2 : Pengetahuan pengelolaan keuangan daerah

X3 : Intensitas Pembinaan

e : Error (kesalahan regresi)

### 3.7.2 Uji F

Uji F (ANOVA) digunakan untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual yang diukur dari *Goodness of Fit* suatu model (Ghozali 2011:97). Pengukuran hipotesis dapat dilakukan dengan cara berikut :

- 1)  $H_0 : \beta = 0$ , maka tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
- 2)  $H_1 : \beta \neq 0$ , maka ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
- 3) *Level of significant* ( $\alpha$ ) sebesar 5%
- 4) Ketentuan yang digunakan adalah (berdasarkan probabilitas):  
Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  tidak berhasil ditolak  
Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  berhasil ditolak

### 3.7.3 Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh yang signifikan masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%), dapat diketahui pengaruh masing-masing

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika terjadi sebaliknya, yaitu nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2011:97).

Pengujian hipotesis dapat menggunakan perbandingan antara  $t$  hitung dan  $t$  tabel dengan kriteria pengambilan keputusan :

- a. Apabila  $t$  hitung  $\geq t$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independennya secara parsial mampu menjelaskan variasi pada variabel dependennya.
- b. Apabila  $t$  hitung  $\leq t$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independennya secara parsial tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel dependennya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kantor Inspektorat yang terdapat di tujuh aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila yaitu pada kantor Inspektorat Kabupaten Gresik yang terletak pada Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245 Kabupaten Gresik, kantor Inspektorat Kabupaten Bangkalan Jalan Soekarno Hatta No. 2B Bangkalan, kantor Inspektorat Kabupaten Mojokerto Jalan RA. Basuni No.19 Kabupaten Mojokerto, kantor Inspektorat Kota Mojokerto Jalan Benteng Pancasila No. 23 Kota Mojokerto, kantor Inspektorat Kota Surabaya Jalan Sedap Malam 5-7 Kota Surabaya, kantor Inspektorat kabupaten Sidoarjo Jalan Pangeran Diponegoro No. 139 Kabupaten Sidoarjo, kantor Inspektorat Kabupaten Lamongan Jalan Basuki Rachmad No. 209 Lamongan.

Meninjau data sekunder yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila, diketahui bahwa aparat Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemerintah kelurahan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. Kemudian aparat Inspektorat juga dituntut merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi guna memberi masukan dan menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang memadai guna menetapkan kebijakan yang memadai, melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya aparat Inspektorat mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan fasilitas pengawasan
- c. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pengelolaan ketatausahaan Inspektorat
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Inspektorat di Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila terdiri dari:

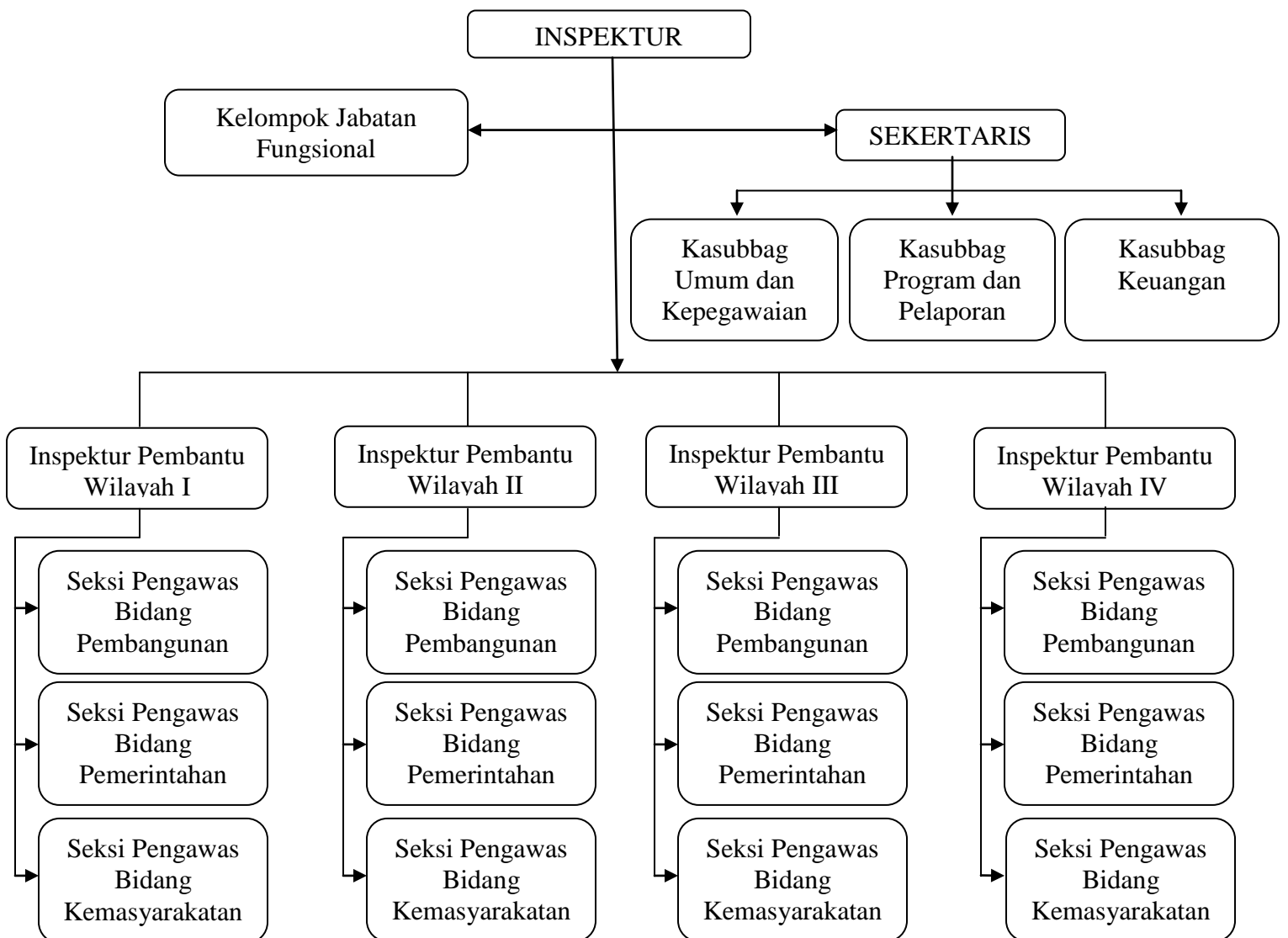
- a. Inspektur
- b. Sekertariat terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. Subbagian Program dan Pelaporan
  3. Subbagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III

## f. Inspektur Pembantu Wilayah IV

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV

## g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila:



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Inspektorat

Kemudian Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian adalah :

a. Inspektur

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah, Inspektur merumuskan kebijakan teknis dan strategis pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah di daerah serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Inspektur memiliki tugas yaitu :

1. Merencanakan program pengawasan.
2. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan.
3. Melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan.
4. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan di bidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati.
6. Melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
7. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekertariat

Sekretariat yang terdiri dari tiga subbagian yaitu bagian umum dan kepegawaian, program dan pelaporan mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada seluruh unsur di lingkup inspektorat dan tugas lain yang diberikan oleh inspektur, kemudian keuangan yang bertugas menyusun, mempersiapkan dan mengelola keuangan di Inspektorat.

Sekretariat mempunyai fungsi meliputi :

1. Peyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
2. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah.
3. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
4. Penyusunan, penginventarisasian, dan pengordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
5. Penanganan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, dan rumah tangga.

c. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektorat pembantu wilayah yang terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektorat Pembantu Wilayah IV, yang kemudian terbagi lagi dalam sub bagian berdasarkan bidangnya, yaitu bidang Pembangunan, bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan. Inspektorat pembantu wilayah ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, aparatur, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan, keuangan, kasus pengaduan, dan tugas lain yang diberikan Inspektur.



Inspektorat pembantu wilayah mempunyai fungsi diantaranya adalah :

1. Pengusulan program pengawasan di setiap masing-masing wilayah dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait.
2. Pengkoordinasian tenaga fungsional auditor dalam pelaksanaan pengawasan pada setiap masing-masing wilayah.
3. Pengkoordinasian pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada setiap masing-masing wilayah.
4. Pengkoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan pada setiap masing-masing wilayah.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat fungsional auditor memiliki tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi diantaranya adalah :

1. Pembuatan program pengawasan di wilayah kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Pengkoordinir pelaksanaan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidangnya.

## 4.2 Analisis Deskriptif

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila yang melakukan tugas pengawasan dari inspektur hingga inspektur pembantu wilayah dan jabatan fungsional auditor yang telah melakukan tugas pengawasan lebih dari satu tahun kerja. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode survey dengan memberikan kuisisioner secara langsung kepada responden. Kuisisioner yang disebar pada ketujuh Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila berjumlah 140 kuisisioner, yang mana diberikan 20 kuisisioner pada setiap Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila. Dari jumlah kuisisioner yang disebar, jumlah kuisisioner yang kembali sebanyak 124 kuisisioner atau dengan tingkat pengembalian 88,57%. Data penyebaran kuisisioner dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1 Data penyebaran dan Pengembalian Kuisisioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
<b>Kuisisioner yang dikirim</b>	140	100%
<b>Kuisisioner yang tidak kembali</b>	16	11,42%
<b>Kuisisioner yang kembali</b>	124	88,57%
<b>Kuisisioner yang dapat digunakan dalam penelitian</b>	124	88,57%

Sumber: Data primer diolah, 2013

### 4.2.1 Deskriptif Responden

Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin responden pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa aparat inspektorat pada pemerintah Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila yang mendominasi adalah berjenis kelamin Pria sebanyak 69 orang atau 55,64% dan berjenis kelamin Wanita sebanyak 55 orang atau 44,35%.

**Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen</b>
<b>Pria</b>	69	55,64%
<b>Wanita</b>	55	44,35%
<b>Total</b>	124	100%

Sumber: Data primer diolah, 2013

Hasil penelitian berdasarkan masa kerja responden pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa Aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila mempunyai masa kerja paling banyak dengan rentang waktu >20 tahun sebanyak 44 orang atau 35,5%, kemudian diikuti dengan  $\leq 5$  tahun sebanyak 27 orang atau 21,77%, dan yang paling sedikit adalah dengan rentang waktu 6-10 tahun sebanyak 15 orang atau 12,09%, selisih tipis dengan rentang waktu 11-15 tahun sebanyak 16 orang atau 12,9%.

**Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Masa Kerja**

<b>Masa Kerja</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen</b>
<b><math>\leq 5</math> Tahun</b>	27	21,77 %
<b>6-10 Tahun</b>	15	12,09 %
<b>11-15 Tahun</b>	16	12,9 %
<b>16-20 Tahun</b>	22	17,74 %
<b>&gt;20 Tahun</b>	44	35,5 %
<b>Total</b>	124	100 %

Sumber: Data primer diolah, 2013

Hasil penelitian berdasarkan umur pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa aparat Inspektorat pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila yang memiliki usia antara 20-30 tahun sebanyak 16 orang atau 12,9%, 31-40 tahun sebanyak 42 orang atau 33,87%, 41-50 tahun sebanyak 38 orang atau 30,64%, dan 51-60 tahun sebanyak 28 orang atau 22,58%.

**Tabel 4.4 Demografi Responden Berdasarkan Umur**

<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen</b>
<b>20-30</b>	16	12,9 %
<b>31-40</b>	42	33,87 %
<b>41-50</b>	38	30,64 %
<b>51-60</b>	28	22,58 %
<b>Total</b>	124	100 %

Sumber : Data primer diolah, 2013

Hasil penelitian berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa Aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila memiliki tingkat pendidikan paling banyak adalah S1 atau S2 sebanyak 114 orang atau 91,93%, kemudian diperoleh jumlah yang sama untuk pendidikan terakhir D3 sebanyak 5 orang atau 4,03%, dan SMA sederajat sebanyak 5 orang 4,03%.

**Tabel 4.5 Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Tingkat Pendidikan Terakhir</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen</b>
<b>S1 atau S2</b>	114	91,93 %
<b>D3</b>	5	4,03 %
<b>SMA Sederajat</b>	5	4,03 %
<b>Total</b>	124	100 %

Sumber : Data primer diolah, 2013

Meninjau dari keseluruhan kriteria untuk mengetahui deskriptif responden penelitian, dapat diketahui bahwa responden yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah benar-benar responden yang diharapkan untuk membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu tentang profesionalisme, pengetahuan aparat Inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah dan intensitas pembinaan aparat Inspektorat kepada setiap SKPD di daerahnya serta penilaian terkait kualitas LKPD. Sehingga pada akhirnya dapat mendukung hasil statistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 2 yaitu tabulasi statistik deskriptif kriteria responden.

#### **4.2.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan pada 124 responden aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. kemudian Tahap selanjutnya adalah mengolah data statistik deskriptif variabel penelitian. Hasil pengolahan data statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

**Tabel 4.6 Rekapitulasi Statistik Deskriptif Variabel penelitian**

Variabel penelitian	N	Min	Max	Mean	(Mean/jumlah pertanyaan)	Standar Deviasi
Profesionalisme (X <sub>1</sub> )	124	27,00	45,00	37,4194	4,15 (Baik)	3,27120
Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X <sub>2</sub> )	124	13,00	35,00	27,7581	3,96 (Cukup Baik)	4,35866
Intensitas Pembinaan(X <sub>3</sub> )	124	25,00	45,00	35,0403	3,89 (Cukup Baik)	4,37547
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	124	17,00	45,00	36,2339	4,02 (Baik)	5,34669

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada variabel Kualitas laporan Keuangan pemerintah Daerah, rata-rata jawaban responden sebesar 36,2339. Hasil analisis dari variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan hasil bagi dari rata-rata jawaban dengan jumlah item pertanyaan yaitu  $36,2339/9 = 4,02$  yang mengartikan dari skala likert yang digunakan, bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila dapat dinilai baik. Variabel Profesionalisme aparat Inspektorat memiliki rata-rata jawaban responden sebesar 37,4194. Hasil analisis dari variabel Profesionalisme aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila ditunjukkan dengan hasil bagi dari rata-rata jawaban dengan jumlah item pertanyaan yaitu  $37,4194/9 = 4,15$  yang mengartikan dari skala likert yang digunakan, bahwa Profesionalisme aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila dapat dinilai baik. Variabel Pengetahuan Aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki rata-rata jawaban responden sebesar 27,7581. Hasil analisis dari variabel Pengetahuan Aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditunjukkan dengan hasil bagi dari rata-rata jawaban dengan jumlah item pertanyaan yaitu  $27,7581/7= 3,96$  yang mengartikan dari skala likert yang digunakan, bahwa Pengetahuan Aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dinilai cukup baik/ hampir baik. Kemudian pada variabel Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila memiliki rata-rata jawaban responden sebesar 35,0403. Hasil analisis dari variabel Intensitas Pembinaan aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila ditunjukkan dengan hasil bagi dari rata-rata jawaban dengan jumlah item pertanyaan yaitu  $35,0403/9= 3,89$  yang mengartikan dari skala likert yang digunakan, bahwa Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila dapat dinilai cukup baik/ hampir baik.

### **4.3 Pengujian Data**

Sebelum dilakukan penelitian pada Aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila, telah dilakukan uji pratest untuk melihat kevalidan dan reliabilitas kuisisioner tersebut. Uji pratest dilakukan pada 30 responden aparat Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan jumlah kuisisioner yang kembali sejumlah 25 kuisisioner. Dalam pengujian pratest yang dilakukan pada aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Jember ini dengan 34 pertanyaan kuisisioner, diperoleh hasil bahwa kesemua pertanyaan valid dan reliabel. Namun, sejumlah 30 kuisisioner yang diperoleh dari aparat Inspektorat Kabupaten Jember ini tidak akan diikutkan dalam uji-uji selanjutnya. Hasil kuisisioner yang akan di olah lebih lanjut adalah kuisisioner yang dibagikan ke 7 Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila, yang mana kuisisioner yang kembali berjumlah 124 kuisisioner.

#### 4.3.1 Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur dan mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk *degree of freedom* ( $df$ )=  $N-2$ , dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel. Untuk menguji apakah masing-masing indikator valid atau tidak, dapat dilihat dalam tampilan kolom *Correlated Item-Total Correlation*. Jika  $r > r$  tabel dan nilai positif maka butir setiap pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Angka kritik ( $r$  tabel) pada penelitian ini adalah 0,413 dengan taraf signifikan 5%. Berdasarkan pengujian validitas instrumen, nilai *Corrected Item- Total Correlation* semuanya berada di atas nilai  $r$  tabel 0,413, yang artinya semua butir pertanyaan dapat dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen dalam

mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian. Hasil uji validitas untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), Profesionalisme Aparat Inspektorat (X1), Pengetahuan Aparat Inspektorat tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X2) dan Intensitas Pembinaan (X3) adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Item</b>	<b>Koefisien Korelasi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</b>	Y1	0,741	Valid
	Y2	0,814	Valid
	Y3	0,614	Valid
	Y4	0,645	Valid
	Y5	0,692	Valid
	Y6	0,724	Valid
	Y7	0,735	Valid
	Y8	0,799	Valid
	Y9	0,831	Valid
<b>Profesionalisme (X1)</b>	X1.1	0,488	Valid
	X1.2	0,730	Valid
	X1.3	0,700	Valid
	X1.4	0,509	Valid
	X1.5	0,552	Valid
	X1.6	0,585	Valid
	X1.7	0,665	Valid
	X1.8	0,652	Valid
	X1.9	0,535	Valid
<b>Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)</b>	X2.1	0,881	Valid
	X2.2	0,859	Valid
	X2.3	0,594	Valid
	X2.4	0,744	Valid
	X2.5	0,609	Valid
	X2.6	0,472	Valid
	X2.7	0,692	Valid
<b>Intensitas Pembinaan (X3)</b>	X3.1	0,444	Valid
	X3.2	0,476	Valid
	X3.3	0,490	Valid
	X3.4	0,431	Valid
	X3.5	0,776	Valid
	X3.6	0,726	Valid
	X3.7	0,590	Valid
	X3.8	0,482	Valid
	X3.9	0,452	Valid

Sumber: Lampiran 3

### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian ini adalah dengan *cronbach's alpha*. Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki *cronbach's alpha* > 0,6. Pengujian reliabilitas data untuk masing-masing variabel ditunjukkan pada tabel 4.8 berikut ini.

**Tabel 4.8**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel		<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kualitas Laporan Pemerintah Daerah (Y)	Keuangan	0,881	Reliabel
Profesionalisme (X1)		0,778	Reliabel
Pengetahuan tentang Keuangan Daerah (X2)	Pengelolaan	0,826	Reliabel
Intensitas Pembinaan (X3)		0,676	Reliabel

Sumber: Lampiran 3

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas menunjukkan *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Maka dapat dinyatakan bahwa ketiga variabel tersebut reliabel.

## 4.4 Uji Asumsi Klasik

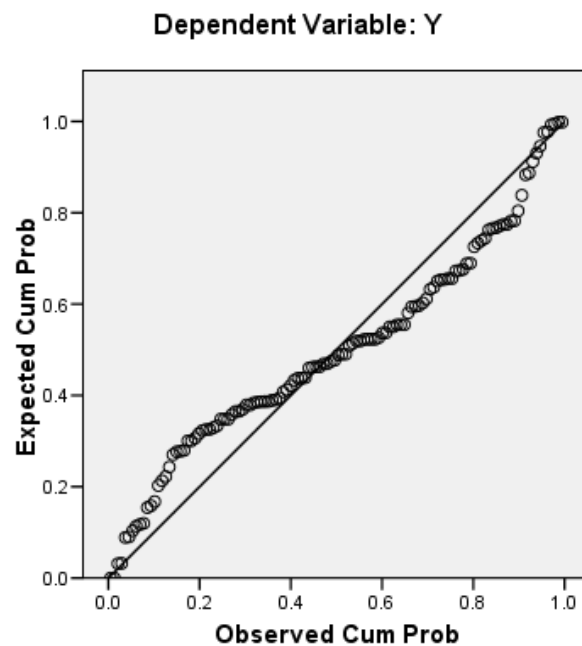
Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi pada penelitian signifikan dan representatif. Analisis regresi berganda perlu menghindari adanya penyimpangan asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaannya. Asumsi dasar tersebut diantaranya adalah normalitas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas.

### 4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen (terikat) dan independen (bebas) masing-masing memiliki

distribusi normal atau tidak yang mana hal ini dapat dilihat dengan menggunakan *normal probability plot*. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar di sekitar garis diagonal.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Gambar 4.2

Uji Normalitas *normal probability plot*

Melihat gambar 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal, dimana data terlihat menyebar mengikuti garis diagonal.

#### 4.4.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu keadaan dimana variabel independen saling berkorelasi atau berhubungan satu dengan lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah persamaan yang bebas dari adanya multikolinieritas antara variabel independen. Alat ukur yang digunakan adalah alat uji atau deteksi *Variance Inflation*

*Factor* (VIF). Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Hasil uji multikolinearitas dari masing-masing variabel dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.9 berikut :

**Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas**

<b>Variabel</b>	<b>Nilai <i>tolerance</i></b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Profesionalisme (X<sub>1</sub>)</b>	0,665	1,504	Non-Multikolinieritas
<b>Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(X<sub>2</sub>)</b>	0,736	1,358	Non-Multikolinieritas
<b>Intensitas Pembinaan(X<sub>3</sub>)</b>	0,737	1,357	Non-Multikolinieritas

Sumber: Lampiran 4

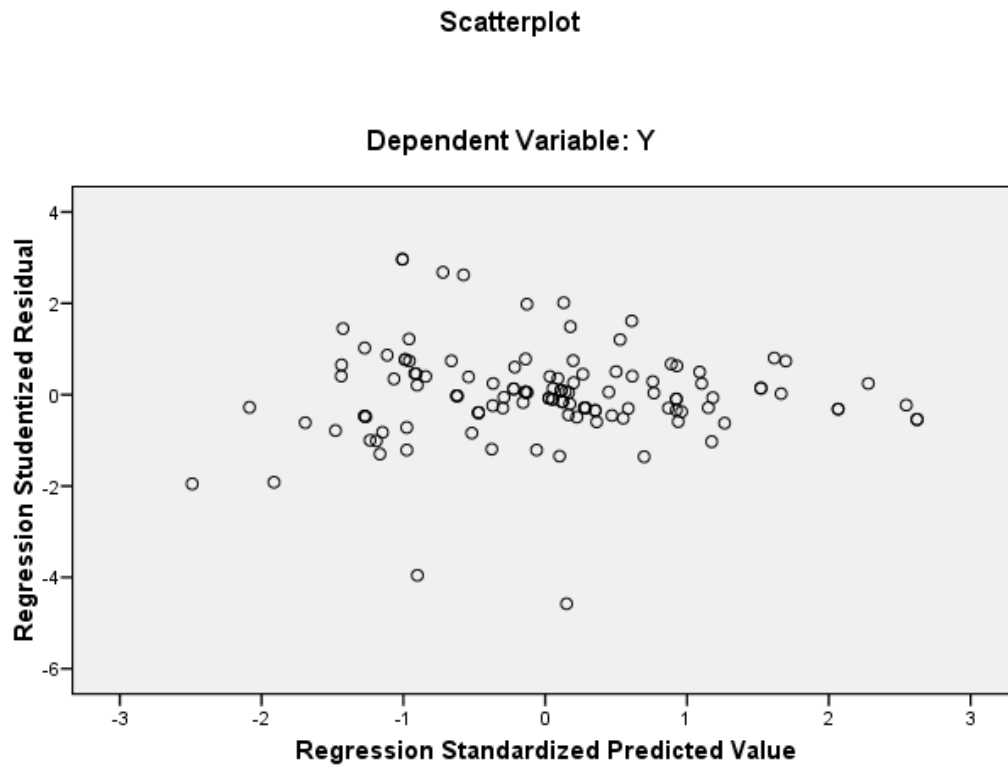
Pada tabel 4.9 terlihat bahwa dari ketiga variabel independen dengan nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak ada masalah multikolinearitas.

#### 4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* pada suatu pengamatan ke pengamatan lain. Regresi yang baik bebas dari heterokedastisitas.

Untuk mengetahui adanya heterokedastisitas dapat dilihat dari gambar Scatterplot dengan kriteria pengamatan sebagai berikut:

- a. apabila ada pola-pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas.
- b. apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 4.3

## Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot

Dari gambar 4.3 di atas ditunjukkan bahwa tidak ada pola tertentu yang jelas sehingga menandakan bahwa tidak terjadi heterokadestisitas untuk variabel penelitian. Maka dengan demikian asumsi dasar bahwa variasi residual untuk semua pengamatan terpenuhi.

## 4.5 Pengujian Hipotesis

### 4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	Keterangan
Konstanta	-1,923	Berbanding Lurus
Profesionalisme	0,559	Berbanding Lurus
Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,293	Berbanding Lurus
Intensitas Pembinaan	0,260	Berbanding Lurus

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.12, dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -1.923 + 0,559 X_1 + 0,293 X_2 + 0,260 X_3 + 4,448$$

Dengan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

X1 = Profesionalisme

X2 = Pengetahuan pengelolaan keuangan daerah

X3 = Intensitas Pembinaan

e = Error (kesalahan regresi)

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta dalam persamaan tersebut adalah sebesar -1.923 . Konstanta yang negatif tidak menjadi masalah, sepanjang X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub> tidak mungkin sama dengan nol, dan tidak mendekati -1 Rietveld dan Sunaryanto (1994). Artinya jika profesionalisme (X<sub>1</sub>), pengetahuan aparat Inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah (X<sub>2</sub>) dan

Intensitas Pembinaan ( $X_3$ ) bernilai 0, maka kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar -1.923.

- 2) Nilai koefisien regresi variabel profesionalisme adalah sebesar 0,559. Artinya jika terjadi suatu peningkatan dan penurunan nilai variabel sebesar 1, maka nilai variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat atau menurun sebesar 0,559 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 0,293. Artinya, jika terjadi peningkatan dan penurunan nilai variabel pengetahuan pengelolaan keuangan daerah sebesar 1, maka nilai variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami peningkatan dan penurunan sebesar 0,293 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel Intensitas Pembinaan adalah sebesar 0,260. Artinya, jika terjadi peningkatan dan penurunan nilai variabel Intensitas Pembinaan sebesar 1, maka nilai variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami peningkatan dan penurunan sebesar 0,260 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

#### 4.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual yang diukur dari *Goodness of Fit* suatu model yang mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusannya adalah:

Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  tidak berhasil ditolak

Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  berhasil ditolak

**Tabel 4.11 Rekapitulasi Hasil Uji F**

<b>F</b>	<b>Signifikansi</b>	<b>Keterangan</b>
27,495	0,000	Signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 27,495 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas (0,000) < 0,05, maka Ho ditolak dan model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### 4.5.3 Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh yang signifikan masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji t di perjelas pada tabel 4.12 berikut ini:

**Tabel 4.12 Rekapitulasi Hasil Uji t**

<b>Variabel</b>	<b>t hitung</b>	<b>t tabel</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Profesionalisme</b>	3,969	1,657	0,000	Berpengaruh secara statistic signifikan
<b>Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	2,916	1,657	0,004	Berpengaruh secara statistic signifikan
<b>Intensitas Pembinaan</b>	2,599	1,657	0,011	Berpengaruh secara statistic signifikan

Sumber: Lampiran 5

Diperoleh t tabel sebesar 1,657 berdasarkan pada  $\alpha = 5\%$  dengan df (n-k-1) atau  $124-3-1 = 120$  (n adalah jumlah sampel yang diteliti dan k adalah jumlah variabel independen).



Berdasarkan tabel 4.12, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Variabel profesionalisme memiliki t hitung sebesar 3,969 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan nilai t tabel sebesar 1,980. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung  $>$  t tabel ( $3,969 > 1,657$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel profesionalisme berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Variabel pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah memiliki t hitung 2,916 dengan tingkat signifikansi 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung  $>$  t tabel ( $2,916 > 1,657$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Variabel Intensitas Pembinaan memiliki t hitung 2,599 dengan tingkat signifikansi 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung  $>$  t tabel ( $2,599 > 1,657$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **4.6 Pembahasan hasil Penelitian**

### **4.6.1 Pengaruh Profesionalisme aparat Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji t, profesionalisme mempunyai nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Artinya, variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sekaligus mengartikan bahwa  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme aparat Inspektorat maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah yang direviu. Hasil jawaban responden pada kuesioner menunjukkan bahwa profesionalisme aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila memiliki peran yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas reviu dan pembinaan aparat Inspektorat itu sendiri terhadap setiap SKPD yang berdampak langsung pada hasil laporan kualitas LKPD Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila.

Melihat kembali dari hasil jawaban responden diketahui bahwa profesionalisme yang dapat dicerminkan dalam banyak hal, seperti kemandirian, keteguhan pada profesi, dan kerja sama yang baik antara sesama aparat Inspektorat telah dimiliki oleh aparat Inspektorat dengan cukup baik, akan tetapi dikemudian hari haruslah ada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi aparat Inspektorat melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan agar hasil kerja reviu dapat lebih maksimal dan memberikan manfaat optimal dalam pelaksanaan tugasnya, seperti yang diharapkan sebagaimana tercantum pada tugas pokok dan fungsi aparat Inspektorat yang berlaku di setiap Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila.

Maka dari itu setiap aparat Inspektorat haruslah menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat, seksama dan juga hati-hati *Prudent* dalam melaksanakan setiap tugasnya *Due Profesional Care* yang mewajibkan auditor untuk melaksanakan tugasnya secara serius, teliti, dan menggunakan seluruh kemampuan dengan pertimbangan professional dalam melakukan tugas audit. Puspitasari (2012) menyatakan bahwa setiap aparat Inspektorat diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan sikap profesionalismenya agar selanjutnya dapat maksimal dan optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga hasil dari pengaplikasian tugasnya pun menjadi maksimal. Semakin baik aparat Inspektorat memperoleh temuan-temuan penyimpangan dalam laporan keuangan, kualitas kerja reviu Aparat Inspektorat juga akan semakin baik, hal ini tentu saja akan berdampak pada semakin besarnya kesempatan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dan kemudian mendapatkan opini yang baik atas audit yang selanjutnya dilakukan oleh BPK terhadap LKPD di setiap Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lubis (2009) dan Puspitasari (2012) yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

#### **4.6.2 Pengaruh Pengetahuan aparat Inspektorat tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Nilai koefisien pada variabel pengetahuan pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,293. Maka jika variabel pengetahuan aparat Inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar 1, maka nilai variabel kualitas LKPD akan mengalami peningkatan sebesar 0,293. Berdasarkan pada hasil uji t, variabel pengetahuan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari kedua hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan aparat Inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Maka dapat disimpulkan semakin baik pengetahuan Aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila tentang pengelolaan keuangan daerah maka semakin tinggi juga kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila.

Berdasarkan pada hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah sudah cukup dipahami dengan baik oleh aparat Inspektorat. Tetapi masih perlu terus dilakukan peningkatan kompetensi maupun pengetahuan agar aparat Inspektorat dapat cepat dan tanggap dalam menemukan penyimpangan dan temuan-temuan dalam proses audit di setiap SKPD melalui penelusuran perencanaan anggaran sampai dengan realisasi anggaran

pada setiap instansi pemerintahan. Karena dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan akan hal tersebut, aparat Inspektorat dapat mengetahui dengan cepat apa yang harus dilakukan dalam menghadapi persoalan yang seperti itu.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Puspitasari (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan aparat Inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah berbanding lurus dengan kualitas laporan keuangan daerah dan dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik, aparat Inspektorat dapat melaksanakan tugas reviu-nya dengan lebih baik lagi.

#### **4.6.3 Pengaruh Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Meninjau dari hasil uji t, Intensitas pembinaan mempunyai nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,011. Artinya, variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sekaligus mengartikan bahwa  $H_0$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang di jelaskan oleh Coutermanche (1997) bahwa tanggungjawab dari internal auditor adalah memberikan pelayanan pada organisasi dengan cara-cara yang konsisten. Kemudian menurut Tugiman (1996) bahwa ukuran keberhasilan internal auditor bukan dari banyaknya temuan, melainkan apabila auditor internal dapat membantu menghadapi persoalan yang ada dalam organisasi. Akan tetapi perlu untuk diingat oleh para auditor internal bahwa pada hakikatnya *Field Audit* sebagai salah satu cara peninjauan fakta dengan melakukan kunjungan langsung pada *auditee*, yang mana *Field Audit* memiliki misi utama sebagai fungsi pembinaan yaitu *Advisory*, *Coaching*, dan *Training* kepada *auditee* yang dituju Kumaat (2011). Sehingga dirasa pembinaan perlu dilakukan secara intensif guna meningkatkan kompetensi setiap SKPD, agar kedepan dapat membentuk suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

Berdasarkan jawaban dari daftar pertanyaan yang diberikan pada responden, dalam hal Intensitas Pembinaan Aparat Inspektorat terhadap SKPD telah cukup untuk membantu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kedepan Pembinaan perlu diperhatikan dan dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang, PERDA, dan peraturan lainya yang berlaku pada setiap daerah dan yang mengatur tentang tugas dan fungsi aparat Inspektorat.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis yang akan diuji menggunakan Uji F, Uji t, dan Uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dikemukakan maka dapat diambil sejumlah kesimpulan yaitu:

1. Hasil Penelitian untuk ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh profesionalisme aparat Inspektorat terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel profesionalisme aparat Inspektorat Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila.
2. Hasil penelitian untuk hipotesis 2 ( $H_2$ ) yang menyatakan terdapat pengaruh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah oleh aparat Inspektorat terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengetahuan aparat Inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila.
3. Hasil penelitian untuk hipotesis 3 ( $H_3$ ) yang menyatakan terdapat pengaruh pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah oleh aparat Inspektorat terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel intensitas pembinaan berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se eks Karesidenan Gerbangkertasusila.

## 5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari adanya keterbatasan- keterbatasan yang ada pada penelitian ini. Adapun beberapa keterbatasan tersebut antara lain :

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode survey dengan kuisioner dalam mendapatkan data penelitian. Hal inilah yang dirasa kurang memberikan hasil penelitian yang maksimal, apalagi bila dikaitkan dengan pengujian atas kinerja aparat institusi pemerintah maka metode yang digunakan tidak cukup membantu untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa ketiga variabel bebas yang ada dalam penelitian ini hanya menjelaskan pengaruh sebesar 47,1 %. Hal ini dirasa bahwa ketiga variabel bebas tersebut belum cukup dikatakan sebagai variabel yang dapat mewakili pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran perbaikan untuk penelitian mendatang. Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih banyak agar hasil penelitian dapat digeneralisasi, misal untuk aparat Inspektorat beberapa Eks Karesidenan atau untuk seluruh aparat Inspektorat Jawa Timur.
2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah metode pengumpulan data dengan metode lain sehingga memperoleh data yang lebih akurat sekaligus untuk meningkatkan kualitas hasil olah data selain dengan menggunakan kuesioner, misalnya dengan observasi atau wawancara langsung pada aparat Inspektorat yang bersangkutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A. Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2010. *Auditing and Assurance Services and ACC Software, 13<sup>th</sup> Edition*. New Jersey :Pentice Hall
- Alexa. 2010. *Mengukur Kinerja Pegawai melalui Lima Indikator*. <http://mgtabersaudara.blogspot.com/2010/03/mengukur-kinerja-pegawai-melalui-lima.html>. [14 Maret 2010].
- Courtemanche, Gil. 1997. *Pandangan Baru Internal Auditing*. Yogyakarta: Kanisius
- Doni, Damanik. 2011. Pengaruh Pengetahuan Tentang Proses Audit Internal, Intuisi, Pemahaman terhadap SAP dan Pengetahuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Peran Inspektorat dalam Reviu Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai). Skripsi : Universitas Sumatra Utara.
- Efendy, M. T. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis: Universitas Diponegoro.
- Fabanyo, Suryanti. 2011. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Skripsi : Universitas Hassanudin Makassar.
- Fahrezi. 2011. *Kendala-kendala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Fungsional*. Tugas Akhir: Universitas Andalas
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Pogram SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Mulivariate dengan Program IBM SPSS Versi 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Kumaat, G, Valery. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga
- Kuntadi, Cris. 2011. *Peningkatan Kualitas Auditor Internal dalam Pelakasanaan Review atas Laporan Keuangan*. <http://pekikdaerah.com/peningkatan-kapasitas-auditor-internal-dalam-pelaksanaan-reviu-atas-laporan-keuangan/> [3 November 2011].



LHP LKPD.2012. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*. BPK RI

Lubis, Arifin dan Iyos Andersen Bangun. 2009. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Bekerja, Kecakapan Profesional, Independensi Pemeriksa terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris : Badan Pengawas Daerah Kabupaten Karo)*. Jurnal Akuntansi Universitas Sumatra Utara.

Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. Edisi II

Nasrullah. 2011. *Memburu Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. <http://inspektoratsulsel.org/%E2%80%9Cmemburu%E2%80%9D-opini-wtp/> [28 Oktober 2011].

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Poernomo, Hadi. 2011. BPK: Opini WTP Tak Jamin Bersih Korupsi. <http://www.investor.co.id/home/bpk-opini-wtp-tak-jamin-bersih-korupsi/15306> [29 Oktober 2011].

Puspitasari, D. I. 2012. *Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi: Universitas Jember.

Queena, Precilia.P., Rohman, Abdul. 2012. *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Aparat Inspektorat Kota/Kabupaten di Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

- Rinaldi, Aldi. 2011. *Sistem Administrasi Keuangan*. <http://blogaldirinaldi.wordpress.com/kajian-teori-sistem-administrasi-keuangan/> [24 Oktober 2011].
- Rietveld, Piet dan Lasmono Tri Sunaryanto. 1994. *87 Masalah Pokok Dalam Regresi Berganda*. Yogyakarta: Andi Offset
- Rosnidah, Ida., Rawi, dan Kamarudin. 2010. *Analisis Dampak Motivasi dan Profesionalisme terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Cirebon)*. Jurnal Akuntansi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon.
- Rosmawati, Rida. 2011. *Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung*. Skripsi : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sunarsip. 2001. *Corporate Governance Audit: Paradigma Baru Profesi Akuntan dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*. Artikel Media Akuntansi, No. 17, Th. VII, April-Mei 2001.
- Sujanto, Agus., Halen Lubis., dan Taufik Hadi. 1997. *Psikologi Kepercayaan Diri*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. (2004). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Stein, S. J. dan Howard. 2002. *Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*. Kaifa. Bandung.
- Sumarwoto. 2007. *Pengaruh Kebijakan Rotasi Kap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal : Politeknik Negeri Semarang.
- Suwardjono. 2005 . *Teori Akuntansi : Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Tugiman, Hiro. 1996. *Perkembangan dan Tantangan Internal Auditing*. Bandung: Karya Putri Wardhani.
- Undang-Undang RI Nomor 17 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Wibowo, B.S. 2002. *Shapering Our Concept and tools*. Bandung. PT. Syamil Cipta Media.

Wijayanto, A. 2008. *Analisis Korelasi Product Moment Pearson*. [http://eprints.undip.ac.id/6608/1/Korelasi\\_Product\\_Moment.pdf](http://eprints.undip.ac.id/6608/1/Korelasi_Product_Moment.pdf) [21 November 2011].